

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI  
PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**RIZAL PRAMUDIARTA**  
**NIM. 12030110141169**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rizal Pramudiarta  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141169  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
TERHADAP NILAI INFORMASI  
PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Persepsi Pegawai SKPD di  
Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)**  
Dosen Pembimbing : Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D

Semarang, 28 Mei 2015

Dosen Pembimbing,



**(Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D)**

NIP. 19730722 20212 1002

## PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

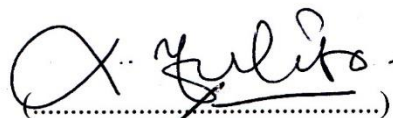


Nama Penyusun : Rizal Pramudiarta  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141169  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI  
PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS  
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi  
Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan  
Kabupaten Kendal)**

Dosen Pembimbing : Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal ..... 10/6 ..... 2015

Tim Penguji

1. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt, Ph.D
2. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D
3. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.

  
.....)  
  
.....)  
  
.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rizal Pramudiarta, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Kompetensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Mei 2015

Yang membuat pernyataan,



(Rizal Pramudiarta)

NIM. 12030110141169

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al Anbiyaa':107)

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

(QS. Muhammad:7)

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

(QS. Ash Shaff:4)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

Ayah, Ibu, Kakak dan Adik

Sahabatku

## **ABSTRACT**

*This research is conducted to investigate the factors that affecting the information value of accounting entity financial reporting. The factors under investigation are The Human Resources Competency, Information Technology, and Government Internal Control System.*

*Data were collected using questionnaire survey. The questionnaires were delivered to 65 employees of local government units (SKPD) Batang Regency and Kendal Regency specifically at financial / accounting departement. A total of 65 questionnaires (100%) were returned and can be processed. The data were processed using SPSS version 19.0. The multiple linear regression analysis was employed to test research hypotheses.*

*The results of hypothesis testing show that human resource competency, and the government internal control system have significant positive effects on the information value of accounting entity financial reporting. Whereas the use of information technology has no a possitive effect on the information value of accounting entity financial reporting.*

*Keywords : information value of local government financial reporting, human resource competency, information technology, government internal control system.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Faktor-faktor yang diteliti adalah kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 65 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan, sebanyak 65 kuesioner (100%) kembali diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 19.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Kata kunci: nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi, kompetensi SDM, teknologi informasi, sistem pengendalian intern.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Ph.D., Akt. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis.
4. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. sebagai dosen wali yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.



5. Drs. Sudarno, M.Si, Akt., Ph.D. sebagai dosen pembina Mizan FEB UNDIP yang telah memberikan banyak arahan, motivasi dan nasehat kepada penulis.
6. Dr. Muhammad Nur, DEA. sebagai dosen pembina INSANI UNDIP yang telah memberikan banyak arahan, motivasi dan nasehat kepada penulis.
7. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt sebagai dosen pembina KSEI FEB UNDIP yang telah memberikan banyak arahan, motivasi dan nasehat kepada penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP atas semua ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak terputus.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP yang membantu kelancaran mahasiswa dalam urusan administrasi akademik.
10. Badan Kesbangpol dan Linmas Jawa Tengah yang telah memberikan izin penelitian.
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin penelitian.
12. Pegawai di SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam pemerolehan data penelitian ini.
13. Pengurus Harian INSANI UNDIP periode 2014: Ali, Agung, Dwi, Ela, Muadz, Dania, Arief, Rhea, Irfan, Hasna, Ricky, Airlangga, Rina, Syifa, Aya, Firsty, Aji, Lia dan semua pengurus INSANI UNDIP periode 2014.

Terimakasih atas kebersamaannya yang selalu menginspirasi. Dimanapun berada, persembahkanlah langkah kita untuk Indonesia bermoral.

14. Keluarga besar Takmir dan Remaja Masjid Kampus Undip: Pak Nirmolo, Pak Luthfi, Ustadz Yasir, Luthfi Gunawan, Wahid, Saftia dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan, kenangan, dan pengalaman yang diberikan selama ini.
15. Pengurus Harian Mizan FEB UNDIP periode 2013: Hilman, Afina, Igha, Alfi, Rizki, Ika, Akbar, Naris, Karin, Erwin, Melani, Geys, Anggra, Intan dan semua pengurus Mizan FEB UNDIP periode 2013. Terimakasih atas kerjasama dan semua kenangan yang tidak terlupakan.
16. Pengurus Harian Peduli Dhuafa Mizan FEB UNDIP periode 2012: Mas Addin, Mbak Wulan, Febi, Nisa, Ria, Ambar dan semua pengurus Peduli Dhuafa Mizan FEB UNDIP periode 2012. Terimakasih atas pengalamannya, tetaplah menebar kasih merajut ukhuwah.
17. Keluarga Besar Mizan FEB UNDIP (BPMAl, Peduli Dhuafa, KSEI, ZIS Center) atas perjalanan di kampus yang indah ini.
18. Keluarga besar KAMMI komisariat FEB UNDIP, terimakasih atas kebersamaannya. Teruslah bergerak untuk Indonesia.
19. Teman-teman Metaligo: Ashim, Anwar, Maul, Irfan, Miqdad, Joni dan Agung atas kebersamaannya selama ini.
20. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2010 yang selama 4 tahun belajar bersama, semoga kita menemukan jalan kesuksesan kita masing-masing.

21. Teman-teman kelas C Akuntansi Regular 2. Terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, kenangan, dan pengalaman yang diberikan selama ini.
22. Teman-teman bimbingan Pak Agung Juliarto angkatan 2010: Samuel, Alvin, Adhi, Dicko dan Kahfi terima kasih telah menjadi teman *sharing* dan berbagi ilmu.
23. Teman-teman KKN Desa Rejosari Barat Kabupaten Batang: Niko, Fany, Meli, Rika, Dyah, Ariani, Wulan, Beni dan Naufal. Semoga tali silaturahmi diantara kita terus terjaga.
24. Teman-teman KAMMIPALA terimakasih atas petualangan dan pengalaman yang diberikan.
25. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Diponegoro Batang (IMADIBA), sukses buat kalian semua.
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
27. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 28 Mei 2015

# DAFTAR ISI

	Halaman
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	15
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	15
1.4 Sistematika Penelitian .....	15
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	17
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	17
2.1.1 Agency Theory .....	17
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i> .....	18
2.1.3 Laporan Keuangan dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi.....	21
2.1.4 Pemerintah Daerah.....	25
2.1.5 Sumber Daya Manusia.....	28

2.1.6 Teknologi Informasi .....	29
2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran .....	35
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	37
2.4.1 Hubungan Kompetensi SDM terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.....	37
2.4.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.....	38
2.4.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	43
3.1.1 Variabel Penelitian.....	43
3.1.2 Definisi Operasional .....	44
3.1.2.1 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah .....	44
3.1.2.2 Kompetensi Sumber daya Manusia.....	45
3.1.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	46
3.1.2.4 Sistem Pengendalian Intern.....	48
3.2 Populasi dan Sampel.....	49
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	52
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	52
3.5 Metode Analisis Data .....	53
3.5.1 Uji Kompetensi Data .....	53
3.5.1.1 Uji Validitas .....	53
3.5.1.2 Uji Non-respon Bias .....	54
3.5.1.3 Uji Reliabilitas .....	55
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
3.5.3 Uji Asumsi Klasik .....	56
3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
3.5.5 Uji Goodness of Fit.....	58

3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	58
3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	58
3.5.5.3 Uji t.....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1.    Deskripsi Objek Penelitian .....	58
4.2.    Analisis Data.....	60
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	61
4.2.2 Uji Validitas.....	63
4.2.3 Uji Reliabilitas.....	66
4.2.4 Uji Asumsi Klasik .....	67
4.2.4.1 Uji Normalitas.....	67
4.2.4.2 Uji Multikolinieritas.....	68
4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.2.5 Uji Hipotesis .....	71
4.2.5.1 Analisis Regresi Berganda .....	72
4.2.5.2 Koefisien Determinasi .....	73
4.2.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	74
4.2.5.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	75
4.3.    Pembahasan .....	77
4.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.....	77
4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.....	78
4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
5.1.    Kesimpulan.....	82
5.2.    Keterbatasan .....	83
5.3.    Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemerintahan.....	7
Tabel 1.2 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan .....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 4.1 Rincian dan Pengembalian Kuesioner .....	58
Tabel 4.2 Karakteristik Sampel.....	59
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel.....	62
Tabel 4.4 Uji Validitas Indikator Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah .....	64
Tabel 4.5 Uji Validitas Indikator Variabel Kompetensi SDM.....	64
Tabel 4.6 Uji Validitas Indikator Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	65
Tabel 4.7 Uji Validitas Indikator Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Realiabilitas Data.....	66
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas .....	69
Tabel 4.11 Uji Glejser .....	71
Tabel 4.12 Persamaan Regresi Linier Berganda .....	72
Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi .....	74
Tabel 4.14 Hasil Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	75
Tabel 4.15 Hasil Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	76
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis .....	77

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Sampel Penelitian .....	89
Lampiran B Output SPSS.....	91
Lampiran C Kuesioner Penelitian .....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan

masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (Halim, 2004).

Menurut Suwardjono (2005), Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: (1) pemerintah

menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (2) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (3) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000). Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah namun tidak terbatas pada: (1) masyarakat, (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta (4) pemerintah.

Pada dasarnya pemerintah daerah berupaya menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Dalam konsep standar pemeriksaan keuangan negara pada bab standar pekerjaan lapangan pemeriksaan keuangan mengenai pengendalian intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan,

salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: (1) relevan, artinya informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu; (2) andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; (3) dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya; (4) dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 penjelasan pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013. Jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah 529. Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual untuk

pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas paling lambat tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah.

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan persentase opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Atas 456 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013, sebanyak 54 LKPD mengalami peningkatan opini dari WDP menjadi WTP. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemerintahan**

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	15	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	335	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	15	12	0	2	29	102	214	9	14	339	36	50	0	2	88
	52%	41%	0%	7%	100%	30%	63%	3%	4%	100%	41%	57%	0%	2%	100%

Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2014

Tuntutan perbaikan dalam pelaporan keuangan pemerintah harus dijawab dengan perbaikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi nilai informasi akuntansi pada pelaporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi mungkin mempengaruhi nilai informasi pada pelaporan keuangan entitas akuntansi selain faktor sumber daya manusia. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem



Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik karena masih sedikit situs web pemerintah daerah yang *update* mengenai informasi keuangannya.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) dalam Mirnayanti (2013) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Dedi (2007) mengenai peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik menunjukkan hasil bahwa kemudahan dalam menggunakan TI tidak selalu memberikan hasil yang positif, dimana pegawai akan menerima TI. Penggunaan TI hanya sekedar alat bantu dan hiburan diwaktu kosong, sehingga penggunaan TI tidak secara maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan *skill* staf dengan

melakukan pelatihan TI secara berkesinambungan dan mengubah budaya *face to face* menjadi *face to technology*. Kondisi ini juga harus didukung dengan kemudahan untuk memperoleh TI dengan harga yang terjangkau dan kemampuan teknologi yang baik. Hasil lainnya juga menunjukkan walaupun pemerintah merasakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan TI, tetapi tidak selalu berakhir dengan penggunaan TI. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya rendahnya kemampuan sumber daya manusia, kurangnya dukungan pimpinan maupun peraturan serta masih minimnya dana.

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem pengendalian intern juga merupakan salah satu kriteria pemberian opini yang diberikan oleh BPK. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2014 yang diterbitkan BPK menyatakan pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern meliputi lima unsur pengendalian, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali

apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Berdasarkan IHPS 1 Tahun 2014, Kelemahan atas SPI dikelompokkan atas tiga kategori berikut: (1) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, artinya kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, artinya kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa; (3) kelemahan struktur pengendalian intern, artinya kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Hasil pemeriksaan keuangan semester I tahun 2014 menunjukkan adanya 5.948 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yaitu: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan**

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<b>1</b>	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.136
<b>2</b>	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.498
<b>3</b>	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.314
Jumlah		5.948

Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1.2 kelemahan SPI yang dominan dalam keuangan adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.498 kasus atau 42% dari jumlah kelemahan SPI. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah sanksi administratif dan/atau perbaikan SPI.

Sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Zuliarti (2012) melakukan penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Rosalin (2011) dan Arfianti (2011). Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan kurang dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dan Nurillah (2014) yang menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Teknologi informasi diketahui memiliki banyak manfaat yang ditawarkan, antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003). Pada penelitian Zuliarti (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan ini sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008), Rosalin (2011), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), serta Nurillah (2014). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Arfianti (2011) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) melakukan penelitian mengenai sistem pengendalian intern pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Hasil penelitian menunjukkan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh Arfianti (2011), dalam penelitiannya SPI sebagai variabel intervening, sedangkan pada penelitian ini SPI sebagai variabel bebas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai informasi pelaporan keuangan, yaitu: Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Arfianti (2011), dan Sukmaningrum

(2012). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat perbedaan hasil beberapa penelitian diatas telah mendorong untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini difokuskan pada SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Alasan penggunaan populasi ini karena provinsi Jawa Tengah dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil audit BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2013 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah ditahun yang sama pula, tidak banyak yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Pemberian opini atas LKPD didasarkan pada pertimbangan atas: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) efektivitas pengendalian intern; (3) kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan (4) pengungkapan yang lengkap (*Full Disclosure*). Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK pada tahun 2013. WDP memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang

berhubungan dengan yang dikecualikan. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal serta pemerintah daerah pada umumnya dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Namun demikian, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas perlu dianalisis faktor-faktor yang dapat menjelaskan peningkatan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Pada bagian ini akan disebutkan dan dijelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan entitas akuntansi pemerintah daerah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

### **I.4 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I :       Pendahuluan



Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

**BAB III : Metode penelitian**

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : Penutup**

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Agency Theory**

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Menurut Rosalin (2011) dalam Nurillah (2014), menyatakan berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan.

### **2.1.2 Teori *Stakeholder***

Teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya untuk kepentingan sendiri namun harus dapat memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan dari *stakeholder* yang ada dalam perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori *stakeholder* umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan. Berdasarkan kajian mendalam literatur Bovaird (2005), Frey (2003), Reidl (2004) dalam Huda (2009) mengidentifikasi sembilan *stakeholder* administrasi lokal, yaitu:

1. Masyarakat

Yaitu semua fungsi seseorang sebagai individu seperti sebagai pengguna layanan, wajib pajak, suara dalam pemilihan, dan sebagainya. Masyarakat mempengaruhi administrasi lokal melalui pemilihan dan pemungutan suara, serta interaksi sehari-hari mereka dengan administrasi dan politisi. Semakin pesatnya penggunaan internet di kalangan warga masyarakat sedikit banyak mendesak administrasi untuk mengadakan pelayanan secara on line.

2. Bisnis

Bisnis adalah dasar kesejahteraan ekonomi. Bisnis sangat mempengaruhi sistem administrasi-politik dan berada dalam hubungan yang konstan. Dalam konteks *e-government*, tekanan parsial dari bisnis pada administrasi meningkat dari fakta bahwa umumnya organisasi sektor privat memiliki teknologi yang lebih maju daripada sektor publik. Ditambah lagi operator sektor privat menjual barang dan jasanya kepada organisasi-organisasi sektor publik.

3. Administrasi publik lain

Administrasi tingkat nasional (federal), regional (kantonal) dan administrasi lokal lainnya dalam kesehariannya memiliki hubungan interaksi dengan administrasi lokal, sehingga dapat terhitung sebagai satu *stakeholder* penting.

4. Politisi

Politisi dan para pejabat, misalnya presiden atau pemimpin suatu daerah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka. Disamping itu pertanyaan mengenai ukuran administrasi yang optimal adalah keputusan politisi dan konsekuensi prioritas dimana politisi atau pejabat tersebut memberikan kebijakan publik. Terlebih lagi pelayan masyarakat pada umumnya dijabat oleh para politisi, kadang-kadang berada pada basis atau orientasi politiknya.

5. Parlemen dan lembaga peradilan

Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan aturan sebagai kerangka acuan bagi kegiatan administrasi dan interaksinya dengan pihak ketiga.

6. *Non Governmental Organization* (NGO), *International Organization* (IO), dan asosiasi NGO, IO, Parpol dan Lembaga Asosiasi mempengaruhi sistem administrasi dan politik melalui lobi-lobi mereka. Lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi atau memiliki andil dalam pembuatan kebijakan yang mendasari kegiatan administrasi.

7. Media

Lembaga administrasi menggunakan media sebagai sumber informasi. Selain itu, media juga berperan sebagai pembuka opini publik melalui penyiaran berita dan topik-topik informasi yang disajikan. Akhirnya, media juga mengekspos disfungsi pada sektor publik, khususnya dalam hal administrasi.

8. Pihak luar negeri

Semakin intensif hubungan sebuah negara dengan dunia luar maka kebijakan dalam negara tersebut disesuaikan dengan aturan-aturan internasional, walaupun pengaruh pihak luar negeri berbeda-beda sesuai dengan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sangat mempengaruhi sistem administrasi politik di Swiss.

## 9. Tenaga kerja

Kekuasaan administrasi sangat ditentukan oleh karakter dan kapasitas para tenaga kerjanya serta hubungan diantara para tenaga kerja di dalamnya.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran stakeholder dan mempengaruhi stakeholder pula.

### **2.1.3 Laporan Keuangan dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas**

#### **Akuntansi**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan, yang terdiri dari

1. pemerintah pusat
2. pemerintah daerah
3. satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Presiden untuk menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah LKPP yang setidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : (1) memiliki manfaat *feedback value*, (2) memiliki manfaat *predictive value*, (3) informasi disajikan tepat waktu, dan (4) informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.

2. Andal

Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (1) Penyajian jujur, artinya informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (2) Dapat diverifikasi, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang



tidak berbeda jauh. (3) Netralitas, artinya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ratifah dan Ridwan (2012) menyatakan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

#### **2.1.4 Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan dalam menjalankan roda kegiatan pemerintah daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Secara umum pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah

1. Perintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan daerah menyebutkan bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah. Pemisahan wewenang dan tanggung jawab bertujuan agar terlaksananya mekanisme *check and balances* serta mendorong profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juga menyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungandengan hak dan kewajiban daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. laporan realisasi anggaran
2. neraca
3. catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### 2.1.5 Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Celviana dan Rahmawati, 2010). Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004) yaitu:

1. Pendidikan

Pendidikan dapat dibagi menjadi: pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal.

2. Pelatihan

Menurut Kendall (2003) dalam Wahyuni (2011), ada beberapa indikator pelatihan, yaitu: menetapkan sasaran yang jelas dan terukur, menggunakan metode pelatihan yang tepat, mempersiapkan materi pelatihan yang mudah dipahami, pelatihan memberikan keuntungan, pelatihan diberikan oleh tenaga ahli, materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai, materi pelatihan disiapkan dengan baik.

3. Pengalaman

Menurut Desseler (2003), pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

Menurut Hevesi (2005) dalam Nurillah (2014), kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Warisno (2008) dalam Sukmaningrum (2012) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

### **2.1.6 Teknologi Informasi**

Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi. Menurut Widjajanto (2001) dalam Trisaputa (2013) Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi

informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

### **2.1.7 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Tujuan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Arfianti, 2011).

Seperti yang telah diuraikan dalam pendahuluan, sistem pengendalian intern pemerintah dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP



tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. keandalan Laporan Keuangan.
3. pengamanan aset negara
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Wilkinson *et al.*, (2000) menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, pemisahan tugas, otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, pemeriksaan independen atas kinerja; dan penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Arfianti (2011), dan Sukmaningrum (2012). Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern. Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif

terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif. Hal ini didukung penelitian Zuliarti (2012) yang mengatakan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian Roviyantie (2011) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sejalan dengan Roviyantie (2011), penelitian Sukmaningrum (2012) dan Nurillah (2014) juga mengatakan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan. Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Metodologi	Variabel	Hasil
Indriasari dan Nahartyo (2008)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah	Analisis regresi linear berganda	Variabel Dependen: nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Independen: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM. memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)	Pengaruh kapasitas sumber daya	Analisis regresi berganda	Variabel Dependen: keandalan dan ketepatanwaktuan	SDM dan pemanfaatan TI berpengaruh positif

	manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, terhadap keterandalan dan ketepatan waktu an pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi		pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Independen: sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel Intervening: Pengendalian Intern Akuntansi	signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu an pelaporan keuangan pemerintah daerah. SDM berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatan waktu an pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Arfianti (2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	Analisis regresi berganda	Variabel Dependen:keandalan dan ketepatan waktu an pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Independen: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah	Sumber daya manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
Sukmaningrum (2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	Analisis regresi berganda	Variabel Dependen: Kualitas Informasi laporan Keuangan. Variabel Independen: kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal	Sumber daya manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), dan factor eksternal berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

Sumber : Berbagai jurnal ilmiah, 2015

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Sukmaningrum, 2012).

Menurut Husna (2013) sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas (andal). Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak kompeten dan kapasitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi

akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan.

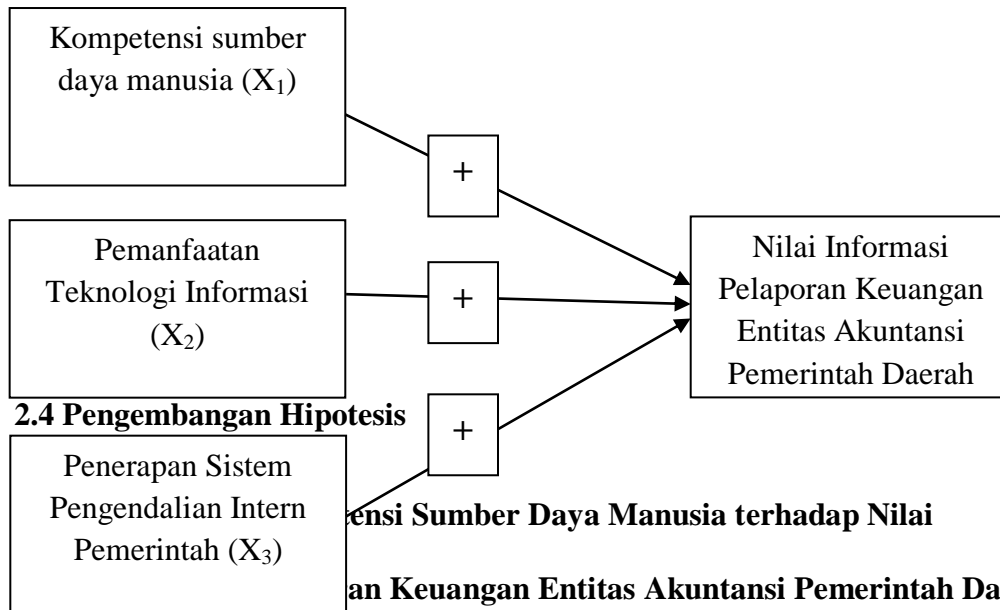
Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (1) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010). Sistem akan berjalan baik apabila ada pemanfaatan teknologi informasi yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain informasi akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi (Husna, 2013). Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**Variabel Independen**

**Variabel Dependen**



Perubahan yang akan dilakukan untuk membenahi sistem pemerintahan terutama terkait dengan bidang akuntansi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha

keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah (Rosalin, 2011). Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H<sub>1</sub> : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah*

#### **2.4.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah**

Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan

proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012), memberikan temuan empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian lainnya pada penelitian Mirnayanti (2013) menemukan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan.

Suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah*



### **2.4.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi**

#### **Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah**

Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Sukmaningrum (2012) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas evektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara sistem pengendalian intern dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah secara khusus pada Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Variabel bebas yang diteliti adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

1. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

2. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

### **3.1.2 Definisi Operasional**

#### **3.1.2.1 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah**

##### **Daerah**

Menurut Halim (2002), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008). Jumlah item pernyataan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.

2. Neraca, laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD, dan catatan atas laporan keuangan disajikan.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.
4. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
5. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
6. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta
7. Laporan keuangan disampaikan secara sistematis dan teratur.

### **3.1.2.2 Kompetensi Sumber daya Manusia**

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Kompetensi menurut *Guy et al* (2002) dalam Nurillah (2014) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah. Pertanyaan pada kuesioner penelitian berdasarkan instrumen penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008). Jumlah item pernyataan variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 10 item dengan skala Likert 1-5. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Subbagian keuangan atau akuntansi memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
2. Paling tidak 10 persen dari staf subbagian keuangan atau akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.
3. Subbagian keuangan/akuntansi anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.
4. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan atau akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
5. Uraian tugas subbagian keuangan atau akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
7. Subbagian keuangan atau akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi.
8. Subbagian keuangan atau akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
9. Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.
10. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

### **3.1.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

Pertanyaan pada kuesioner penelitian berdasarkan pada penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008). Jumlah item pernyataan variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 8 item dengan skala Likert 1-5. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Subbagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
3. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No. 71 Tahun 2010) tentang SAP.
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

### 3.1.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan pada kuesioner penelitian berdasarkan pada penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008). Jumlah item pernyataan variabel sistem pengendalian intern adalah 9 item dengan skala Likert 1-5. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Subbagian keuangan/akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi:
  - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas
  - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
  - c. Prosedur akuntansi aset
  - d. Prosedur akuntansi selain kas
2. Daftar rekening (*chart of account*) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.
3. Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.
4. Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
5. Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.
6. Catatan akuntansi dijaga untuk tetap “up-to-date”.



7. Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.
8. Sistem akuntansi yang ada memungkinkan *audit/transaction trail*.
9. Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan data IHPS semester dua tahun 2013 yang diterbitkan BPK, kedua kabupaten tersebut mendapatkan opini WDP pada laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan data BPK pada tahun 2008 sampai 2012 kedua kabupaten tersebut selalu mendapat opini WDP sehingga tidak ada perubahan dalam opini yang diberikan oleh BPK. Penelitian Ismiyati dan Widiyanto (2013) mengungkapkan dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemda, pada semester satu tahun 2013 perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah secara proaktif telah bekerja sama dengan pemda dalam upaya meraih opini WTP. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi (1) pendampingan penyusunan laporan keuangan 11 pemda; (2) pendampingan reviu laporan keuangan pada inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 13 pemda; (3) evaluasi LAKIP sebanyak 22 pemda; dan (4) evaluasi kinerja pelayanan publik sebanyak 2 pemda. Sedangkan

untuk satuan kerja pada Kementerian/Lembaga pada semester satu tahun 2013, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah secara proaktif telah melaksanakan pendampingan penyusunan laporan keuangan di 12 satuan kerja Kementerian/Lembaga dengan jumlah kegiatan sebanyak 27 kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, artinya sudah ada perbaikan sistem yang harapannya berpengaruh positif perbaikan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Jawa Tengah dengan populasi pada SKPD Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan studi eksporatif. Studi eksporatif dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan dimasa lalu. Studi eksploratif dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah, ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kukuh (Sekaran, 2006).

Tujuan penelitian ini baru mengumpulkan informasi mengenai gejala (studi eksploratif), untuk itu teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, sehingga hasil penelitian merupakan indikasi awal bukan generalisasi. *Non probability sampling* adalah

teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011). Teknik-teknik yang termasuk ke dalam *non probability sampling* ini antara lain *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling insidental*, *sampling purposive*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling* (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini penyampelan atas responden dilakukan secara *sampling kuota*. *Sampling kuota* adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2011). Kelebihan *sampling kuota* adalah praktis karena jumlah responden sudah ditentukan diawal, data lebih mudah dan cepat digunakan (Sekaran, 2006).

Dalam penelitian ini *sampling kuota* dipilih karena besarnya populasi, yaitu pada pegawai SKPD di dua kabupaten. Jumlah SKPD yang terdiri dari kantor, sekretariat, bagian, dinas, badan, satuan, RSUD, inspektorat, kecamatan dan kelurahan pada Kabupaten Batang sebanyak 61 SKPD dan pada Kabupaten Kendal sebanyak 54 SKPD. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada SKPD. Jumlah pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Batang sebanyak 106 dan pada SKPD Kabupaten Kendal sebanyak 121.

Dalam penelitian yang sejenis yaitu penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) data hasil pengisian kuesioner pada SKPD Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir yang berhasil diolah sebanyak 73 responden dan dalam penelitian Nurillah (2014) data hasil pengisian kuesioner pada SKPD Kota Depok yang berhasil

diolah sebanyak 64 responden. Roscoe (1975) yang dikutip Sekaran (2006) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel bahwa secara umum untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30. Penelitian ini menggunakan *sampling kuota* yang diambil pada masing-masing daerah minimal 30 responden, sehingga peneliti akan mendapatkan data tidak kurang dari 60 responden.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kuesioner harus disusun dengan baik dan mudah dipahami agar responden mampu dan mau menjawab sehingga mendapatkan *response rate* setinggi mungkin.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Supranto (2000) dalam Kaltsum (2013) menyatakan bahwa kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat

dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti.

Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada SKPD. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2015. Lokasi penelitian ini terbatas pada SKPD yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Uji Kompetensi Data**

##### **3.5.1.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Validitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan sahih mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya. Umar (2002) dalam Nurillah (2014) menyatakan korelasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment Pearson, sebagai berikut :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

$r$  = koefisien korelasi *product moment*

$N$  = jumlah responden

$X$  = skor untuk masing-masing item pernyataan

$Y$  = jumlah skor keseluruhan dari seluruh item pernyataan untuk masing-masing responden

### 3.5.1.2 Uji Non-respon Bias

Non-respon bias adalah kesalahan yang timbul karena subyek sampel yang tidak memberikan respon (non-respon) ternyata lebih representatif daripada sampel yang memberikan tanggapan, sehingga sampel yang diteliti kurang akurat mencerminkan karakteristik populasinya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Pengujian non-respon bias dilakukan dengan melihat apakah ada perbedaan karakteristik sampel antara responden yang menjawab dan yang tidak memberikan jawaban. Langkah yang dilakukan adalah memisahkan jawaban responden yang datang awal sebagai wakil (proxy) dari responden yang benar benar ingin menjawab dengan jawaban responden yang datang akhir sebagai proxy responden yang tidak menjawab. Kemudian dilakukan uji t (t-test) untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara kedua klasifikasi responden. Jika hasil t-test menunjukkan  $p > 0,05$  maka hal ini berarti tidak terdapat perbedaan jawaban yang diberikan oleh kedua kelompok responden, sehingga penelitian dapat dikatakan telah memenuhi syarat representasi populasi.

### 3.5.1.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten/stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Menurut kriteria Nunnally (1994) yang dinyatakan dalam Ghozali (2011), variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$ . Semakin nilai *alpha* nya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya untuk masing-masing variabel.

### 3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, minimum, dan maksimum (Ghozali, 2011). Persebaran data diukur menggunakan standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Semakin kecil deviasi standar menunjukkan bahwa data tersebut mengelompok di sekitar rata-rata hitung sehingga persebaran datanya pun semakin kecil. Standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum menggambarkan dispersi (persebaran) variabel yang bersifat metrik, sedangkan non-metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel.

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011).

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.



Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Apabila residual plot yang terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak dan berada diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas atau tidak ada masalah heteroskedastisitas. Cara lainnya yaitu dengan metode Glejser dengan cara meregres nilai absolute residualnya terhadap variabel independen, apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% (0,05). Jika dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### **3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi dari  $X_1$  (kompetensi sumber daya manusia)

$X_1$  = variabel kompetensi sumber daya manusia

$\beta_2$  = koefisien regresi dari  $X_2$  (pemanfaatan teknologi informasi)

$X_2$  = variabel pemanfaatan teknologi informasi

$\beta_3$  = koefisien regresi dari  $X_3$  (sistem pengendalian intern)

$X_3$  = variabel sistem pengendalian intern

$e$  = standar error

### **3.5.5 Uji Goodness of Fit**

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t. perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2011).

#### **3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.

#### **3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika signifikansi  $> 0,05$  (5%), maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
- Jika signifikansi  $< 0,05$  (5%), maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan)

### 3.5.5.3 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5%, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bila probability t hitung  $> 0,05$  Ho diterima dan H1 ditolak.
2. Bila probability t hitung  $< 0,05$  Ho ditolak dan H1 diterima.